

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Pengaruh Budaya Organisasi Dan Insentif Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran

Agus Rohman

Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Perbaikan Komunikasi dan Motivasi Kerja Pada Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Deriyani

Model Strategi Pemasaran Politik Pilgub Provinsi Lampung 2014

Dora Rinova

Pengaruh Perencanaan Partisipatif Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Implementasi Dana Desa (Studi di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)

Erwin Putu Basai

Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Penumpang Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub. Divre IV Tanjung Karang

Mei Endang Lestari

Pengaruh Semangat Kerja Pegawai Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pengguna Jasa Puskesmas Way Halim Kota Bandar Lampung

Ristra Astriani

Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pada PT. Telkom Divisi Akses Kedaton Bandar Lampung

Vivi Ariani



e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 2 No. 3 Desember 2016

Pembina

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA

Penanggung Jawab

Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

Ketua Penyunting

Dr. Malik, M.Si

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Yulianto, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Akhmad Suharyo, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Nur Efendi, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal, M.Si (FISIP-UHO)

Penyunting Pelaksana

Refly Setiawan, S.A.P., M.Si

Vida Yunia Cancer, S.A.N

Tata Usaha

Winda, SE

Penerbit

Universitas Bandar Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Alamat Redaksi

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu – Bandar Lampung 35142

Telp: (0721) 789825, Fax: (0721) 770261, E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 2 No. 3 Desember 2016

DAFTAR ISI

Pengaruh Budaya Organisasi Dan Insentif Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran	1-19
Agus Rohman	
Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Perbaikan Komunikasi dan Motivasi Kerja Pada Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang	20-28
Deriyani	
Model Strategi Pemasaran Politik Pilgub Provinsi Lampung 2014	29-40
Dora Rinova	
Pengaruh Perencanaan Partisipatif Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Implementasi Dana Desa (Studi di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)	41-51
Erwin Putu Basai	
Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Penumpang Pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Sub. Divre IV Tanjung Karang	52-61
Mei Endang Lestari	
Pengaruh Semangat Kerja Pegawai Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pengguna Jasa Puskesmas Way Halim Kota Bandar Lampung	62-72
Ristra Astriani	
Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pada PT. Telkom Divisi Akses Kedaton Bandar Lampung	73-85
Vivi Ariani	

**PENGARUH PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN PENGAWASAN
MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI DANA DESA
(Studi di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)**

Oleh:

**ERWIN PUTUBASAI, MAHASISWA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ABSTRACT

Fajar Baru Village, Jati Agung Subdistrict, South Lampung District is one of the villages that receives the flow of village funds, and it is in this village fund management that it is interesting to do research on whether community participation through musrenbang in planning the use of village funds has been implemented in order to use the village funds Absorbed later can really touch the public interest and in accordance with the pre-established development plan.

The purpose of this research is to know and analyze the influence of participatory planning and community supervision on the implementation of village funds in Fajar Baru Village, Jati Agung District, Lampung Selatan Regency Lampung Province either partially or simultaneously. The data collection techniques in this study are observation, interview, questionnaire and documentation. The population in this study amounted to 38 people. In this study the authors used the analysis of qualitative and quantitative data In general, the results of this study are as follows: 1) Participatory planning has a positive and significant impact on the implementation of village funds. 2) Community monitoring has a positive and significant impact on the implementation of village funds. 3) Participatory planning and community monitoring together have a positive and significant impact on the implementation of village funds in Fajar Baru village, Jati Agung sub-district, Lampung Selatan District, Lampung Province.

Keywords: participatory planning, community monitoring and village funding

A. PENDAHULUAN

Dana Desa yang digulirkan oleh pemerintah bersumber dari APBN ke setiap desa, merupakan jenis pendapatan transfer yang diterima oleh desa dengan kisaran jumlah 1 miliar perdesa. Dana desa tersebut tentu saja memiliki tujuan dan aturan yang menyertainya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sehingga apa yang menjadi tujuan dan maksud digulirkannya dana desa tersebut dapat tercapai dengan baik. Dalam mengelola dana yang tidak sedikit itu tentu saja menuntut pemahaman dari parat desa dan masyarakat, serta niat baik dalam memanfaatkan dana tersebut sehingga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa, mengingat banyaknya kasus penyelewengan yang

terjadi akibat dari digulirkan dana desa tersebut.

Desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan juga mendapatkan transfer dana desa sebesar Rp.1.056.567.949 (satu miliar lima puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), dalam pengelolaannya banyak terdapat pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh aparat desa fajar baru seperti jalan, gedung kantor desa, drainase dll, dengan total belanja pada bidang pembangunan ini sebesar Rp.751.011.115. Dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa inilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai apakah penggunaan dana desa tersebut sudah mengakomodir aspirasi masyarakat

setempat, yang berarti merupakan perencanaan dan ditetapkan bersama antara aparat desa dan masyarakat, serta bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa oleh aparat desa, dan apakah selain pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik, dana desa juga digunakan untuk memberdayakan dan membina masyarakat, yang dapat meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, mengingat Pendapatan Asli Desa (PAD) Fajar Baru masih belum ada.

Permasalahan yang akan diteliti pada makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah perencanaan partisipatif berpengaruh terhadap implementasi dana desa di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung ?
2. Apakah pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap implementasi dana desa di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung?
3. Apakah perencanaan partisipatif dan pengawasan masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap Implementasi Dana Desa di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung?

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh perencanaan partisipatif terhadap implementasi dana desa di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
2. Pengaruh pengawasan masyarakat terhadap implementasi dana desa di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
3. Pengaruh perencanaan partisipatif dan pengawasan masyarakat secara bersama-sama terhadap implementasi dana desa di Desa Fajar Baru

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif seperti yang dikemukakan oleh Abe (2002:81) sebagai berikut : Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.

Kemudian Wicaksono dan Sugiarto (Wijaya,2001:25), lebih lanjut mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut :

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat
 - a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
 - b. Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
2. Partisipatoris (keterlibatan)
Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan bicara, waktu dan tempat.
3. Dinamis
 - a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak
 - b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.
4. Sinergitas
 - a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak
 - b. Selalu menekankan kerjasama antar wilayah administrasi dan geografi
 - c. Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin mejadi

kelengkapan yang sudah ada, sedang atau dibangun.

- d. Memperhatikan interaksi yang terjadi diantara stakeholder

5. Legalitas

- a. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
- b. Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.
- c. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

6. Fisibilitas (Realistis)

Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dijalankan, dan mempertimbangkan waktu.

2. Konsep Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat sebagai salah satu bentuk pengawasan melekat yang berasal dari luar organisasi mempunyai sifat lebih luas dibandingkan dengan pengawasan atasan langsung, karena bukan hanya untuk kepentingan pimpinan unit organisasi, akan tetapi juga bagi seluruh aparat dalam organisasi yang bersangkutan.

Selanjutnya langkah-langkah pengawasan masyarakat yang dignakan sebagai indikator dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Winardi, 1986:397, yaitu :

1. Mengukur hasil pekerjaan
2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan)
3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

3. Konsep Implementasi

Menurut pendapat Bastian. (2006:98) mengemukakan bahwa implementasi pengelolaan dana desa hendaknya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Tepat Guna dan Tepat Sasaran

Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera, dengan kata lain dana yang dikucurkan pemerintah harus benar-benar dipergunakan untuk kepentingan publik.

b. Transparansi

Hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap dana desa adalah mengenai transparansi. Makna transparan pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi dan keterbukaan tentang pengelolaan dan informasi mengenai keuangan desa, pemerintah dan aparat desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. Transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka mengenai pertanggung jawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya

c. Akuntabilitas

Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa hal lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas atau bentuk pertanggungjawaban adalah sebuah bentuk keharusan yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa yang menjadi pelaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat

yang menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran. Prinsip akuntabilitas ini memiliki pengertian bahwa kinerja dan tindakan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

d. Tertib Dan Disiplin Anggaran

Pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan dengan tertib dan memperhatikan disiplin anggaran. Keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran memiliki pengertian bahwa keseluruhan anggaran untuk desa harus diimplementasikan dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu perlu juga dilakukan pencatatan atas penggunaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka pengelolaan dana desa harus mentaati hukum, harus tepat jumlah, tepat waktu, dan juga harus sesuai dengan prosedur yang telah ada. Tujuan dari hal ini adalah untuk menghindari penyimpangan dan meningkatkan profesionalitas pengelolaannya. Dalam tertib dan disiplin pengelolaan anggaran, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada pedoman yang melandasinya.

4. Konsep Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Dana Desa tidak boleh digunakan asal-asalan atau untuk kegiatan yang tidak

menguntungkan pengembangan Desa. Dana Desa harus sesuai atau selaras dengan RPJMDes dan RKPDes. Dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa harus memenuhi empat prioritas utama. Keempat prioritas utama penggunaan Dana Desa yaitu; pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif asosiatif, dan dianalisa secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran mengenai keadaan obyek terkait permasalahan yang akan diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, selanjutnya hasil survey juga akan dianalisa secara asosiatif, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independent variable) terhadap variabel terikat (dependent variable) (Arikunto, 2006:109)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat penyelenggara pemerintahan di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 38 orang, penelitian ini bersifat sensus karena seluruh populasi dijadikan responden penelitian, sehingga penelitian ini menggunakan total populasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : kuesioner, wawancara, dan dokumentasi

D. HASIL PENELITIAN

Perencanaan Partisipatif berdasarkan hasil hitung dari 38 orang responden penelitian dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Perencanaan Partisipatif

No	Interval	Kategori	Frekuensi (Responden)	%
1	42-50	Sangat Baik	5	13,1
2	34-41	Baik	7	18,4
3	26-33	Cukup Baik	14	36,9
4	18-25	Tidak Baik	9	23,7
5	10-17	Sangat Tidak Baik	3	7,9
Jumlah			38	100

Sumber Data, diolah 2016

Dari hasil jawaban responden dapat diketahui bahwa, secara keseluruhan responden menyatakan perencanaan partisipatif dalam rangka mengelola dana desa di Desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Provinsi Lampung dalam kategori “Cukup Baik”.

Analisis variabel pengawasan masyarakat secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan Masyarakat

No	Interval	Kategori	Frekuensi (Responden)	%
1	42-50	Sangat Baik	5	13,2
2	34-41	Baik	6	15,8
3	26-33	Cukup Baik	16	42,1
4	18-25	Tidak Baik	9	23,7
5	10-17	Sangat Tidak Baik	2	5,2
Jumlah			38	100

Sumber Data, diolah 2016

Secara keseluruhan mayoritas responden menyatakan bahwa pengawasan masyarakat pada penggunaan dana desa di desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam kategori “Cukup Baik” untuk itu hendaknya pengawasan masyarakat pada

penggunaan dana desa di desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, lebih ditingkatkan.

Variabel Impelementasi dana desa berdasarkan tabel distribusi dibawah ini diketahui:

Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Variabel Impelementasi Dana Desa

No	Interval	Kategori	Frekuensi (Responden)	%
1	42-50	Sangat Baik	6	15,8
2	34-41	Baik	8	21,1
3	26-33	Cukup Baik	19	50,0
4	18-25	Tidak Baik	5	13,1
5	10-17	Sangat Tidak Baik	0	0
Jumlah			38	100

Sumber Data, diolah 2016

Impelementasi dana desa pada Desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam kategori “Cukup Baik”. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden dominan pada interval 26-33 atau ada 19 orang (50,0%).

1. Koefisien Korelasi Secara Parsial

Berdasarkan hasil dari analisis korelasi parsial (*Partial Correlation*) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Koefisien Korelasi Secara Parsial
Correlations

		Perencanaan Partisipatif	Pengawasan Masyarakat	Impelementasi Dana Desa
Perencanaan Partisipatif	Pearson Correlation	1	.736**	.445**
	Sig. (2-tailed)		.000	.005
	N	38	38	38
Pengawasan Masyarakat	Pearson Correlation	.736**	1	.575**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	38	38	38
Impelementasi Dana Desa	Pearson Correlation	.445**	.575**	1
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	
	N	38	38	38

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Koefisien korelasi atau hubungan antara Perencanaan Partisipatif (X₁) dengan Implementasi Dana Desa (Y)

Koefisien korelasi perencanaan partisipatif dengan impelementasi dana desa di Desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Provinsi Lampung dapat dilihat pada probabilitas (Sig) $0.000 < 0.05$ maka Ho ditolak berarti ada hubungan yang positif dan signifikan antara X₁ dengan Y. Besaran nilai koefisien sebesar 0,445 artinya hubungan antar kedua variabel dalam kategori “Cukup Tinggi” berada pada interval (0,401 s/d 0,600) dan arah korelasi (+) berarti jika perencanaan partisipatif dalam kategori baik dalam artian masyarakat dilibatkan dalam perencanaan penggunaan dana desa maka

impelementasi dana desa akan baik, begitu juga sebaliknya jika perencanaan partisipatif dalam kategori kurang baik dalam artian masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan penggunaan dana desa maka impelementasi dana desa juga akan kurang baik.

Koefisien korelasi atau hubungan X₂ dengan Y

Koefisien korelasi pengawasan masyarakat dengan impelementasi dana desa di Desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dapat dilihat pada probabilitas (Sig) $0.000 < 0.05$ maka Ho ditolak berarti ada hubungan yang positif dan signifikan antara X₂ dengan Y. Besaran nilai koefisien sebesar sebesar

0,575 artinya hubungan antar kedua variabel dalam kategori “tinggi” berada pada interval (0,601 s/d 0,800) dan arah korelasi (+) berarti jika pengawasan masyarakat dalam kategori baik dalam artian masyarakat dilibatkan dalam pengawasan penggunaan dana desa maka implemementasi dana desa akan baik, begitu juga sebaliknya jika pengawasan masyarakat dalam kategori kurang baik

dalam artian masyarakat tidak dilibatkan dalam pengawasan penggunaan dana desa maka implemementasi dana desa akan kurang baik.

2. Koefisien Korelasi Secara Simultan

Berdasarkan hasil analisis korelasi secara simultan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.19 Koefisien Korelasi Secara Simultan Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.576 ^a	.331	.293	7.776

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Masyarakat, Perencanaan Partisipatif

Koefisien korelasi atau hubungan X₁ dan X₂ dengan Y

Korelasi perencanaan partisipatif dan pengawasan masyarakat dengan implemementasi dana desa sebesar 0,576 artinya hubungan antar ketiga variabel dalam kategori “Cukup Tinggi” berada pada interval (0,401 s/d 0,600) dan arah korelasi (+). Berarti jika perencanaan partisipatif dan pengawasan masyarakat kategori baik maka akan meningkatkan

implemementasi dana desa dan sebaliknya jika perencanaan partisipatif dan pengawasan masyarakat tidak baik maka akan berakibat buruknya implemementasi dana desa.

3. Koefisien Determinasi Secara Parsial

Analisis determinasi secara untuk mengetahui persentase variabel X mempengaruhi Y.

Tabel 4.20 Koefisien Determinasi X₁ terhadap Y Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.445 ^a	.198	.176	8.395

a. Predictors: (Constant), Perencanaan Partisipatif

$$\begin{aligned}
 \text{KP} &= r^2 \times 100\% \\
 \text{Koefisien Penentu} & \\
 = 0,445 \times 0,445 &= 0,198
 \end{aligned}$$

$$(KP) = r^2$$

0,198 X 100% = 19,8%. Jadi besarnya pengaruh perencanaan partisipatif terhadap implemementasi dana desa sebesar 19,8%.

Tabel 4.21 Koefisien Determinasi X₂ terhadap Y

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
-------	---	----------	-------------------	----------------------------

1	.575 ^a	.330	.312	7.673
---	-------------------	------	------	-------

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Masyarakat

KP = $r^2 \times 100\%$
 Koefisien Penentu (KP) = r^2
 $= 0,575 \times 0,575 = 0,330$
 $0,330 \times 100\% = 33,0\%$ Jadi besarnya pengaruh pengawasan masyarakat terhadap implemmentasi dana desa sebesar 33,0%

4. Koefisien Determinasi Secara Simultan

Analisis determinasi secara simultan untuk mengetahui pengaruh atau seberapa besar persentase variabel X mempengaruhi Y.

Tabel 4.22 Koefisien Determinasi Secara Simultan Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.576 ^a	.331	.293	7.776

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Masyarakat, Perencanaan Partisipatif

Koefisien Penentu (KP) = (R^2)
 $= 0,576 \times 0,576 = 0,331$
 $0,331 \times 100\% = 33,1\%$ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya pengaruh perencanaan partisipatif dan pengawasan masyarakat terhadap implemmentasi dana desa sebesar 33,1% dan sisanya sebesar 66,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti seperti komitmen aparat desa, perilaku aparat desa, komunikasi, sosialisasi dan lain-lain.

5. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apakah nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Suharsini Arikunto, 2003 : 178)

Tabel 4.23 Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.974	4.647		2.577	.014
Perencanaan Partisipatif	.352	.220	.049	1.237	.004
Pengawasan Masyarakat	.553	.210	.539	2.638	.002

a. Dependent Variable: Implemmentasi Dana Desa

$Y = +_1 X_1 + +_2 X_2 + Et$
 $Y = 11,974 + 0,352 X_1 + 0,553 X_2 + Et$
Interpretasi:

1. =11,974 mempunyai makna
 Jika perencanaan partisipatif dan pengawasan masyarakat dianggap

- konstan atau tidak dilakukan maka impelementasi dana desa sebesar 11,974 persen
2. $t_1 = 0,352$ mempunyai makna
Jika perencanaan partisipatif lebih ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak unsur lapisan yang ada di masyarakat dalam musrenbang dan pengawasan masyarakat dianggap konstan atau pengawasan tidak efektif dilaksanakan maka impelementasi dana desa meningkat sebesar 0,352 persen.
 3. $t_2 = 0,553$ mempunyai makna
Jika pengawasan masyarakat ditingkatkan peranannya dalam melakukan evaluasi mengenai ketepatan pelaksanaan program dengan aturan yang dianjurkan pemerintah dan perencanaan partisipatif dianggap konstan dengan kata lain masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan maka impelementasi dana desa meningkat sebesar 0,553 persen.

Berdasarkan keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai koefisien Regresi X_2 lebih besar dari pada nilai koefisien Regresi X_1 hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel pengawasan masyarakat lebih tinggi atau dominan dibandingkan perencanaan partisipatif dalam meningkatkan impelementasi dana desa pada Desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan partisipatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap impelementasi dana desa di Desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
2. Pengawasan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap impelementasi dana desa di Desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

3. Perencanaan partisipatif dan pengawasan masyarakat secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap impelementasi dana desa di Desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab, Solichin, 2001, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Solo, Pondok Edukasi
- Anwas, Oos M, 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta
- Aprilia T., Krisnha S.A., Prima G.P.N., Totok M, 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung : Alfabeta
- Ari Kunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta : Rineka Cipta
- A Theresia, K.S. Andini, P.G.P. Nugraha, dan T. Mardikanto.2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat : Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, cetakan ketiga, Gajah
- Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*,. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M. 2004, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Wilayah, dalam buku Otonomi Dan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Erlangga
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta, Cidesindo
- Rahardjo, Adisasmita, 2014. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset
- Singarimbun, Masri dan Efendi, 1989. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Gunung Agung
- Subandiyah, 1992, *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan*, Jakarta : Arcan
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES
- Terry, George R. 1986. *Asas-asas Manajemen* Alih Bahasa; Winardi. Bandung : Alumni
- Wahab, Abdul, Solichin, 1990, *Pengantar analisis Kebijakan Negara*, Jakarta : Rineka Cipta
- Winardi, 2000, *Manajer dan Manajemen*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugoroho. 2006. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa
- Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Prinsip-prinsip perencanaan menurut Prinsip-prinsip Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD (2007)
- C. Dokumen**
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2021
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Fajar Baru (APBDes) tahun 2016
- Rencan Kerja Pemerintah Desa Fajar Baru Tahun 2016
- D. lain-lain**
- (<http://www.radarlamsel.com/kades-lebung-sari-dilaporkan-ke-kejati/>).

(<http://www.lampost.co/berita/masyarakat-pesawaran-tuntutkejelasan-dana-desa>)

(<http://bappeda.banjarmasinkota.go.id/2011/05/pengertianperencanaan.tujuan.html>)

ISSN : 2443-1214

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 2 No. 3 Desember 2016

Diterbitkan Oleh :
Program Pascasarjana
Magister Ilmu Administrasi
Universitas Bandar Lampung

